

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan lima penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan. Penelitian terdahulu tersebut digunakan sebagai pembanding dan referensi. Penelitian tersebut antara lain :

1. Febrianty Lengkoan, Vecky A.J Masinambow, dan Audie O. Niode (2018)

Topik penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Net Interest Margin* (NIM), *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Total Kredit Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2015-2017.” Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah variabel DPK, NIM dan NPL baik secara parsial maupun simultan berpengaruh yang signifikan terhadap Total Kredit Bank Umum di Indonesia.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum dengan periode penelitian tahun 2015 – 2017 secara bulanan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Purposive Sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Regresi Linier Berganda. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Variabel DPK dan NIM secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap total kredit Bank Umum di Indonesia periode 2015-2017.

- b. Variabel NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Total Kredit Bank Umum di Indonesia periode 2015-2017.
- c. Secara Simultan variabel DPK, NIM dan NPL memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Total Kredit Bank Umum di Indonesia periode 2015 - 2017.

2. Dwitya Yulia Ramandhana, A.A Ketut Jayawarsa dan Ita Silvia Azita Aziz (2018)

Topik penelitian ini adalah “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga *BI Rate*, Pertumbuhan Ekonomi, *Non Performing Loan* (NPL) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Umum di Indonesia Periode 2013-2017.” Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah variabel inflasi, Suku Bunga *BI Rate*, pertumbuhan ekonomi, NPL, dan CAR baik secara parsial maupun simultan berpengaruh yang signifikan terhadap KUR.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2013-2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Purposive Sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Regresi Linier Berganda. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara parsial variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penyaluran KUR Bank Umum periode 2013-2017.

- b. Secara parsial variabel suku bunga *BI Rate*, *NPL* dan *CAR* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Penyaluran KUR Bank Umum periode 2013-2017.
- c. Secara simultan variabel inflasi, suku bunga *BI Rate*, pertumbuhan ekonomi, *NPL*, dan *CAR* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penyaluran KUR Bank Umum periode 2013-2017.

3. Friskihlah E. Wowiling & Lisbeth Mananeke (2018)

Topik penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terhadap Pemberian Kredit Periode 2013-2016.” Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah variabel *CAR*, *NPL*, *ROA*, *BOPO*, dan *LDR* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pemberian Kredit pada BPD dan BPR.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 BPD dan 334 BPR di Indonesia Timur dengan periode penelitian tahun 2013 - 2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Purposive Sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan Teknik Analisis Data Panel Regresi menggunakan *Least Squares with Group Dummy*. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Variabel *CAR* pada Bank Pembangunan Daerah secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pemberian kredit, sedangkan variabel *CAR* pada Bank Perkreditan Rakyat secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pemberian kredit.

- b. Variabel NPL pada Bank Pembangunan Daerah secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pemberian kredit, sedangkan Variabel NPL pada Bank Perkreditan Rakyat secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pemberian kredit.
- c. Variabel ROA pada Bank Pembangunan Daerah secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pemberian kredit, sedangkan Variabel ROA pada Bank Perkreditan Rakyat secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pemberian kredit.
- d. Variabel BOPO pada Bank Pembangunan Daerah secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pemberian kredit, sedangkan Variabel BOPO pada Bank Perkreditan Rakyat secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pemberian kredit.
- e. Variabel LDR pada Bank Pembangunan Daerah secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pemberian kredit, sedangkan Variabel LDR pada Bank Perkreditan Rakyat secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pemberian kredit.

4. Mutiara Istiqomah & Naning Margasari (2018)

Topik penelitian ini adalah “Determinan Penyaluran Kredit Investasi oleh Bank Devisa Nasional di Indonesia.” Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah variabel NPL, CAR, ROA, BI *7-Day Repo Rate*, Inflasi dan GDP baik secara parsial maupun simultan berpengaruh yang signifikan terhadap Penyaluran Kredit Investasi pada Bank Devisa Nasional.

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Bank Devisa Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian tahun 2012 – 2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode *Purposive Sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Regresi Linier Berganda. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Variabel NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Penyaluran Kredit Investasi oleh Bank Devisa Nasional di Indonesia periode 2012-2017.
- b. Variabel CAR, BI *7-Day Repo Rate*, inflasi dan GDP secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Penyaluran Kredit Investasi oleh Bank Devisa Nasional di Indonesia periode 2012-2017.
- c. Variabel ROA secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Penyaluran Kredit Investasi oleh Bank Devisa Nasional di Indonesia periode 2012-2017.
- d. Variabel NPL, CAR, ROA, BI *7-Day Repo Rate*, inflasi dan GDP secara simultan memiliki pengaruh terhadap Penyaluran Kredit Investasi oleh Bank Devisa Nasional di Indonesia periode 2012-2017.

5. Andyta Diar Pratiwi (2019)

Topik penelitian ini adalah “Pengaruh Inflasi, BI *7-Day Repo Rate*, *Financing to Deposit Ratio* dan Investasi terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.” Permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini adalah apakah variabel inflasi, *BI &-Day Repo Rate*, FDR dan investasi baik secara parsial maupun simultan berpengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bank Umum di Indonesia.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan metode penelitian tahun 2016 - 2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Purposive Sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Regresi Data Panel. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Variabel inflasi dan FDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah periode 2016-2018.
- b. Variabel *BI 7-Day Repo Rate* secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah periode 2016 – 2018.
- c. Variabel investasi secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah periode 2016 – 2018.
- d. Secara simultan variabel inflasi, *BI 7-Day Repo Rate*, FDR dan investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah 2016 – 2018.

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan telah dijabarkan dan terdapat adanya beberapa persamaan dan perbedaan di antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang di tunjukkan melalui tabel 2.1.

Tabel 2.1
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU
DAN PENELITIAN SEKARANG

Keterangan	Febrianty Lengkoan, Vecky A.J, & Audie O. (2018)	Dwitya Yulia, A.A Ketut J. & Ita Silvia A.A (2018)	Friskihlah E. & Lisbeth Mananeke (2018)	Mutiara Istiqomah & Naning Margasari (2018)	Andyta Diar Pratiwi (2019)	Wiranti Kusuma (Peneliti Sekarang)
Variabel Terikat	Kredit Perbankan	KUR	Kredit Perbankan	Kredit Investasi	Pembiayaan UMKM	Kredit UMKM
Variabel Bebas	DPK, NIM, NPL	Inflasi, BI Rate, Pertumbuhan ekonomi, NPL, CAR	CAR, NPL, ROA, BOPO, LDR	NPL, CAR, ROA, BI 7-Day Repo Rate	Inflasi, BI 7-Day Repo Rate, FDR, Investasi	DPK, NPL, BOPO, ROA, NIM, BI 7-Day Repo Rate
Populasi	Bank Umum	Bank Umum	BPD dan BPR	Bank Devisa Nasional	Bank Umum Syariah	BPD
Teknik Sampling	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>
Periode Penelitian	2015- 2017	2013 - 2017	2013- 2016	2012- 2017	2016-2018	2014- 2019
Jenis Data	Data Sekunder	Data Sekunder	Data Sekunder	Data Sekunder	Data Sekunder	Data Sekunder
Metode Pengumpulan Data	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi
Teknik Analisis	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda	Data Panel Regresi dengan <i>Least Squares with Group Dummy</i>	Regresi Linier Berganda	Regresi Data Panel	Regresi Linier Berganda

Sumber : Penelitian terdahulu Febrianty Lengkoan, Vecky A.J, dan Audie O. (2018); Dwitya Yulia, A.A Ketut J. dan Ita Silvia A.A (2018); Friskihlah E. dan Lisbeth Mananeke (2018); Mutiara Istiqomah dan Naning Margasari (2018); Andyta Diar Pratiwi (2019).

2.2 Landasan Teori

Landasan teori ini membahas teori - teori yang memiliki keterkaitan dan mendukung penelitian mengenai penyaluran kredit UMKM dan kinerja keuangan yang digunakan pada penelitian agar mendapatkan suatu hasil penelitian yang relevan. Teori ini akan diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Pengertian Bank Pembangunan Daerah Konvensional

Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah bank yang didirikan pada daerah – daerah tingkat 1. Dasar hukum dalam pendirian Bank Pembangunan Daerah adalah Undang - Undang No.13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Modal Bank Pembangunan Daerah sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) pada masing – masing tingkatan (Kasmir, 2012:22). Bank Pembangunan Daerah Konvensional merupakan Bank yang didirikan pada daerah - daerah tingkat 1 yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan dua metode yaitu :

- a. Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- b. Menetapkan berbagai biaya – biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya untuk jasa – jasa yang diberikan. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan *fee based*.

2.2.2 Pengertian Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK 03/2016 pasal 3 ayat 1 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK 03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti mendefinisikan Bank Umum berdasarkan kegiatan usaha yang biasa disebut BUKU merupakan pengelompokan Bank berdasarkan kegiatan usahanya dan modal inti yang dimiliki. Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) BUKU, yaitu sebagai berikut :

- i BUKU 1 (satu) adalah Bank dengan modal inti sampai dengan kurang dari Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Bank BUKU 1 (satu) dapat melakukan kegiatan usaha dalam rupiah berupa kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan penyaluran dana berupa produk dan/atau aktivitas dasar, kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*), kegiatan keagenan dan kerjasama dengan cakupan terbatas, kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas, dan penyediaan jasa atau layanan lainnya. Bank juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit dan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA).
- ii BUKU 2 (dua) adalah Bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Bank BUKU 2 dapat melakukan kegiatan usaha dalam rupiah dan valuta asing yang meliputi kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana dengan cakupan yang lebih luas, kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*), kegiatan *treasury*

secara terbatas, kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan lebih luas, dan penyediaan jasa atau layanan lainnya. Bank juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit.

iii BUKU 3 (tiga) adalah Bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah). Bank BUKU 3 (tiga) dapat melakukan seluruh kegiatan usaha baik dalam rupiah maupun valuta asing serta dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia.

iv Buku 4 (empat) adalah Bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp 30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah). Bank BUKU 4 (empat) dapat melakukan seluruh kegiatan usaha baik dalam rupiah maupun valuta asing serta dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3 di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri.

2.2.3 Penyaluran Dana

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan pembebanan bunga (UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan). Kredit yang diberikan membutuhkan manajemen perkreditan yang meliputi perencanaan,

pengorganisasian, pelaksana, dan pengawasan agar kredit tersebut dapat dikelola dan berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan debitur. Bank harus menggunakan prinsip *prudential* atau prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana.

Bank dalam kondisi perekonomian yang normal dapat menyalurkan kredit hingga mencapai 70 persen hingga 90 persen dari aset yang dimiliki oleh bank. Pendapatan yang berasal dari penerimaan bunga kredit merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank. Kredit yang tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan terjadinya kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*). Kredit bermasalah yang timbul dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan bunga bank serta tingkat pengembalian pokok kredit sehingga mengakibatkan kerugian pada bank.

Kredit yang diberikan kepada debitur memiliki beberapa fungsi adalah sebagai berikut (Latumaerissa 2014: 135) :

1. Meningkatkan daya guna dari uang
2. Meningkatkan daya guna dari barang
3. Sebagai alat stabilitas ekonomi
4. Meningkatkan kegairahan usaha masyarakat
5. Meningkatkan pendapatan nasional
6. Meningkatkan hubungan internasional

Unsur – unsur dalam pemberian kredit kepada calon debitur adalah sebagai berikut (Kasmir 2012: 83) :

1. **Kepercayaan**, yaitu keyakinan dari pemberian kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar – benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. **Objek**, yaitu uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
3. **Waktu**, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pmebayaran yang akan diterima kembali oleh bank di masa yang akan datang.
4. **Konsekuensi**, yaitu kemungkinan bank tidak dapat menagih kembali kredit yang diberikannya karena tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan keadaan masa depan
5. **Kreditur**, adalah pihak yang memberikan pinjaman (kredit).
6. **Debitur**, adalah pihak yang menerima pinjaman (kredit).

Kredit dapat diberikan kepada debitur jika bank sudah merasa yakin bahwa kredit benar - benar dapat kembali dan telah memperoleh hasil penilaian kredit sebelum kredit diberikan. Penilaian kredit dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk meyakinkan tentang nasabahnya. Prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C dan 7P (Kasmir 2012:101). Prinsip penilaian kredit dengan analisis 5C kredit adalah sebagai berikut :

1. *Character*

Character adalah sifat atau watak debitur. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah untuk membayar kreditnya.

2. *Capacity (Capability)*

Capacity adalah untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dan mengelola bisnis serta dalam mencari laba.

3. *Capital*

Capital adalah untuk mengetahui sumber – sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition*

Condition adalah menilai kredit dari kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa datang sesuai sektor masing – masing.

Prinsip penilaian kredit selain 5C adalah dengan menggunakan prinsip penilaian kredit 7P. Prinsip penilaian kredit dengan analisis 7P (Kasmir, 2012:103) adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari – hari maupun masa lalunya.

2. *Party*

Mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi/golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan mendapat fasilitas kredit yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan/tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau tidak.

5. *Payment*

Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Mengetahui bagaimana nasabah dapat menjaga kredit yang diberikan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan yang dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi

Kasmir (2012:85) menjelaskan bahwa secara umum jenis – jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. Segi kegunaan

a. Kredit investasi

Kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama. Kredit ini biasanya digunakan untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu berupa barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Kredit ini tidak ada perambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini biasanya diberikan kepada pemasok atau agen – agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja dari suatu bidang usaha.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. Kredit ini biasanya diberikan untuk keperluan modal kerja dari suatu bidang usaha.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit ini masa pengembaliannya yaitu di atas 3 sampai dengan 5 tahun. Kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit / manufaktur dan juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit Dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Kredit yang diberikan kepada calon debitur akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit yang diberikan kepada debitur tanpa memberikan jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini biasanya diberikan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit Pertanian

Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek/panjang.

b. Kredit Peternakan

Kredit yang diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya, peternakan ayam dan untuk panjang seperti kambing/sapi.

c. Kredit Industri

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit Pertambangan

Kredit yang diberikan untuk usaha tambang. Kredit ini biasanya berbentuk kredit dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.

e. Kredit Pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang menempuh kegiatan belajar.

f. Kredit Profesi

Kredit yang diberikan pada kalangan para profesional seperti, dokter, dosen, atau pengacara.

g. Kredit Perumahan

Kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

h. Sektor – sektor usaha lainnya.

Prosedur pemberian kredit sangatlah penting dalam proses pemberian kredit. Tujuan dari adanya prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit yang akan diberikan kepada calon debitur. Prosedur merupakan tata cara atau peraturan yang harus dilakukan oleh calon debitur sebelum kredit diberikan yang tersusun secara berurutan. Kasmir (2012:105)

menjelaskan bahwa prosedur pemberian kredit oleh badan hukum adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Proposal

Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal yang dilampiri dengan dokumen – dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank yaitu KTP, TDP, dan NPWP. Proposal pengajuan kredit berisi keterangan tentang riwayat perusahaan, tujuan kredit, besarnya kredit, jangka waktu kredit, dan jaminan kredit.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Berkas yang diajukan diselediki terlebih dahulu sehingga sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Berkas yang dinyatakan oleh pihak bank belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi berkas yang kurang tersebut, maka bank berhak membatalkan permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.

3. Penilaian Kelayakan Kredit

Kredit dapat dinilai dengan menggunakan prinsip 5C atau 7P, namun untuk kredit yang jumlahnya lebih besar perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan.

4. Tahap I

Penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuan pada tahap I ini adalah untuk mendapatkan keyakinan pihak perbankan apakah berkas-berkas sesuai dan lengkap seperti yang

diinginkan dan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan calon debitur yang sebenarnya.

5. Peninjauan ke Lokasi (*On The Spot*)

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil tahap I.

6. Tahap II

Kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan – kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

7. Keputusan Kredit

Pihak Bank menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak. Kredit yang sudah dikatakan layak, maka harus dipersiapkan administrasinya, apabila ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing – masing.

8. Penandatanganan Akad Kredit

Calon nasabah terlebih dahulu menandatangani akad kredit sebelum kredit dicairkan, kemudian pihak bank berhak mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

9. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat – surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

2.2.4 Kredit UMKM

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah mendefinisikan bahwa UMKM merupakan usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Kriteria untuk usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 50 juta dan memiliki hasil penjualan tahunan sebesar Rp 300 juta. Kriteria untuk usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 milyar. Kriteria untuk usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 milyar dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 milyar sampai dengan Rp 50 milyar. Bank Indonesia mewajibkan Bank Umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM, dengan tahapan pencapaian pada tahun 2018 paling rendah sebesar 20 persen dari total portofolio kredit atau pembiayaan (Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank). Penelitian ini difokuskan dalam penyaluran Kredit dari sisi UMKM. Secara matematis perhitungan penyaluran Kredit UMKM adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyaluran Kredit UMKM} = \frac{\text{Jumlah Kredit UMKM}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{Rumus (1)}$$

Keterangan :

- a. Jumlah kredit UMKM adalah total dari kredit UMKM yang diberikan oleh bank kepada pihak UMKM.
- b. Total kredit adalah total kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan variabel penyaluran kredit UMKM sebagai variabel terikat (Y).

2.2.5 Penghimpunan Dana

Sumber dana perbankan dalam menghimpun dana dibagi menjadi 3 yaitu Dana Pihak Pertama, Dana Pihak Kedua dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana pihak pertama merupakan dana yang berasal dari pihak bank itu sendiri dalam bentuk Modal disetor, Agio Saham dan Laba ditahan. Dana pihak kedua merupakan dana yang berasal dari pihak luar dan berupa pinjaman dalam bentuk Pinjaman Bank Indonesia, Pinjaman dari bank lain, surat berharga diterbitkan dan Pinjaman yang diterima. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, simpanan berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$DPK = \frac{DPK(t) - DPK(t-1)}{DPK(t-1)} \dots \dots \dots \text{Rumus (2)}$$

Keterangan :

- a. $DPK_{(t)}$ merupakan Dana Pihak Ketiga tahun ini
- b. $DPK_{(t-1)}$ merupakan Dana Pihak Ketiga tahun sebelumnya

Pengukuran tingkat dana pihak ketiga pada penelitian ini menggunakan DPK sebagai variabel bebas (X) yang mempengaruhi penyaluran kredit UMKM sebagai variabel terikat (Y).

2.2.6 Kinerja Bank

Kinerja keuangan bank merupakan cara untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank, yang dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah disajikan bank secara periodik dan berguna bagi beberapa pihak (Kasmir 2012:310). Bank wajib membuat laporan yang berisi tentang kinerja keuangan pada periode tertentu untuk mengetahui kondisi keuangan bank yang sebenarnya secara keseluruhan. Laporan tersebut juga berguna untuk menilai apakah kinerja manajemen bank tersebut dalam kondisi baik/tidak selama periode waktu tertentu. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan berbagai rasio seperti, Rasio Likuiditas, Rasio Kualitas Aset, Rasio Sensitivitas terhadap pasar, Rasio Efisiensi, dan Rasio Rentabilitas atau Profitabilitas. Rasio – rasio tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Likuiditas

Kasmir (2012: 315) mendefinisikan bahwa likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Bank yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja dan kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya baik sehingga dapat berdampak kepada kepercayaan nasabah. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja likuiditas yaitu sebagai berikut (Rivai et al, 2013:482) :

a. *Cash Ratio (CR)*

CR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan

menggunakan alat likuid yang dimiliki. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{CR} = \frac{\text{Aset Likuid}}{\text{Pasiva Likuid}} \times 100\% \dots\dots\dots\mathbf{Rumus (3)}$$

Keterangan :

- i Aset likuid diperoleh dengan menjumlahkan sisi aset pada laporan posisi keuangan.
- ii Pasiva likuid diperoleh dengan menjumlahkan sisi pasiva pada laporan posisi keuangan.

b. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, hal ini menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan. Rumus untuk mencari LDR adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{LDR} = \frac{\text{Jumlah kredit yang diberikan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\% \dots\dots\dots\mathbf{Rumus (4)}$$

Keterangan :

- i. Jumlah kredit yang diberikan merupakan total kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga.
- ii. Total dana pihak ketiga merupakan total dari tabungan, giro dan simpanan berjangka.

c. *Investing Policy Ratio (IPR)*

IPR merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidiasi surat -

surat berharga yang dimiliki. Rasio IPR dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPR} = \frac{\text{Surat Berharga}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{Rumus (5)}$$

Keterangan :

- i. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi, surat berharga yang tersedia untuk dijual, surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*) dan surat obligasi.
- ii. Total dana pihak ketiga merupakan total dari tabungan, giro dan simpanan berjangka.

d. Loan to Asset Ratio (LAR)

LAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Rumus yang digunakan untuk menghitung LAR adalah sebagai berikut :

$$\text{LAR} = \frac{\text{Jumlah kredit yang diberikan}}{\text{Jumlah aset}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{Rumus (6)}$$

Keterangan :

- i. Jumlah kredit yang diberikan merupakan total kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga kecuali PPAP.
- ii. Jumlah aset merupakan total dari aset tetap dan aset lancar pada laporan posisi keuangan.

Pengukuran tingkat likuiditas pada penelitian ini tidak menggunakan rasio likuiditas sebagai variabel bebas (X) yang mempengaruhi penyaluran kredit UMKM sebagai variabel terikat (Y).

2. Kualitas Aset

Rivai et al (2013:473) mendefinisikan kualitas aset yaitu aset yang digunakan untuk memastikan kualitas aset yang dimiliki oleh bank tersebut serta mengetahui nilai riil dari aset. Kualitas aset menunjukkan penilaian terhadap kondisi aset bank tersebut dan kecukupan manajemen risiko kredit. Bank perlu menjaga kualitas aset dan melakukan perhitungan penyisihan penghapusan aset dalam memelihara kelangsungan bank tersebut. Rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas aset yaitu sebagai berikut (SEOJK Nomor 43/SEOJK.03/2016 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional) :

a. Aset Produktif Bermasalah (APB)

APB merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif. Aset produktif bermasalah terdiri dari 3 kolektibilitas yaitu kurang lancar, diragukan dan macet (KL, D dan M). Secara matematis perhitungan APB adalah sebagai berikut :

$$\text{APB} = \frac{\text{Aset produktif bermasalah}}{\text{Total aset produktif}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{Rumus (7)}$$

Keterangan :

- i Aset produktif bermasalah adalah aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
- ii Total aset produktif adalah terbentuk dalam “penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk rkredit, surat berharga, penempatan

dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan itu”.

b. *Non Performing Loan (NPL)*

NPL merupakan rasio antara jumlah total kredit dengan kualitas lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit. Rasio ini mengukur kemampuan suatu bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan kepada pihak ketiga. Kredit bermasalah tersebut merupakan kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (KL, D dan M). Rasio NPL dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{Rumus (8)}$$

Keterangan :

- a. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- b. Total kredit merupakan jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga baik terkait maupun tidak terkait.

Pengukuran kualitas aset pada penelitian ini menggunakan rasio NPL sebagai variabel bebas (X) yang mempengaruhi penyaluran Kredit UMKM sebagai variabel terikat (Y).

3. Sensitivitas Pasar

Sensitivitas pasar merupakan penilaian terhadap kemampuan modal bank untuk mengcover akibat dari yang ditimbulkan oleh perubahan risiko pasar

dan kecukupan manajemen risiko pasar (Rivai et al 2013:485). Rasio yang digunakan untuk mengukur sensitivitas pasar adalah sebagai berikut (Kuncoro dan Suhardjono, 2012:273) :

a. Posisi Devisa Neto (PDN)

PDN yaitu penjumlahan dari nilai absolut antara selisih aset dan kewajiban dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing dan ditambahkan dengan selisih *Off Balance Sheet* yang merupakan komitmen atau kontinjensi dalam rekening administratif dan dibagi dengan modal. Rumus yang digunakan untuk menghitung PDN adalah sebagai berikut :

$$\text{PDN} = \frac{(\text{Aset valas} - \text{Pasiva valas}) + \text{Selisih Off Balance Sheet}}{\text{Modal}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{Rumus (9)}$$

Keterangan :

- i Aset valas merupakan penjumlahan dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, dan kredit yang diberikan.
- ii Pasiva valas merupakan penjumlahan dari giro, simpanan berjangka, sertifikat simpanan berjangka, surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima.
- iii *Off Balance Sheet* yaitu tagihan dan kewajiban komitmen kontinjensi valas.
- iv Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

b. Interest Rate Risk (IRR)

IRR merupakan risiko yang timbul karena adanya perubahan tingkat suku bunga. Rasio IRR dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{IRR} = \frac{\text{IRSA}}{\text{IRSL}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{Rumus (10)}$$

Keterangan :

- i *Interest Rate Sensitivity Asset (IRSA)* adalah total dari surat berharga yang dimiliki, *Reverse repo*, kredit yang diberikan, dan penempatan pada bank lain.
- ii *Interest Rate Sensitivity Liability (IRSL)* adalah total dari giro tabungan, simpanan berjangka, kewajiban segera lain, dan pinjaman yang diterima.

Penelitian ini tidak menggunakan PDN dan IRR sebagai variabel bebas (X) yang mempengaruhi penyaluran kredit UMKM sebagai variabel terikat .

4. Efisiensi

Rivai et al (2013:480) mendefinisikan bahwa efisiensi merupakan rasio yang digunakan untuk memastikan efisiensi dan kualitas pendapatan bank secara benar dan akurat. Bank harus mengatur efisiensi kondisi keuangan agar dapat meningkatkan laba dalam menjaga usahanya. Rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi adalah sebagai berikut :

a. **Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

BOPO merupakan rasio perbandingan antara total beban operasional terhadap total pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio BOPO dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total beban Operasional}}{\text{Total pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{Rumus (11)}$$

Keterangan :

- i Total beban operasional merupakan penjumlahan dari beban bunga beserta beban operasional selain bunga.
- ii Total pendapatan operasional merupakan hasil penjumlahan dari pendapatan bunga dengan pendapatan operasional.

b. *Fee Based Income Ratio (FBIR)*

FBIR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan dari jasa yang diberikan kepada nasabah selain bunga dan provisi pinjaman. Secara matematis perhitungan FBIR adalah sebagai berikut:

$$\text{FBIR} = \frac{\text{Pendapatan operasional selain bunga}}{\text{Total pendapatan operasional}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{Rumus (12)}$$

Keterangan :

- i Pendapatan operasional selain bunga terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari peningkatan nilai wajar aset keuangan, penurunan nilai wajar aset keuangan dividen, keuntungan dari penyertaan, *fee based income* komisi, keuntungan penjualan aset keuangan, keuntungan penjualan aset keuangan, keuntungan transaksi spot dan derivatif, serta pendapatan lainnya.
- ii Pendapatan operasional terdiri dari hasil bunga, provisi dan komisi, pendapatan valas dan pendapatan lain-lainnya.

Pengukuran tingkat efisiensi pada penelitian ini menggunakan rasio BOPO sebagai variabel bebas (X) yang mempengaruhi penyaluran Kredit UMKM sebagai variabel terikat (Y).

5. Rentabilitas / Profitabilitas

Rentabilitas/Profitabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan rentabilitas baik untuk mendukung kegiatan operasionalnya dan permodalan (Rivai et al 2013:480). Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah sebagai berikut :

a. Return On Asset (ROA)

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rumus perhitungan ROA adalah sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{Rumus (13)}$$

Keterangan :

- i Laba sebelum laba sebelum pajak adalah laba tahun berjalan sebelum pajak.
- ii Rata – rata total aset volume usaha atau aset selama satu tahun terakhir.

b. Return On Equity (ROE)

ROE merupakan indikator yang penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. ROE merupakan perbandingan antara laba bersih dengan modal bank itu sendiri. Rasio ROE dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{Rumus (14)}$$

Keterangan :

- i Laba setelah pajak adalah laba bersih tahun berjalan setelah pajak. Perhitungan laba setelah pajak disetahunkan.
- ii Modal sendiri dalah keseluruhan modal yang dimiliki oleh bank.

c. Net Interest Margin (NIM)

NIM adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah pendapatan bunga bersih dalam penggunaan aset produktifnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio NIM adalah sebagai berikut :

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata-rata aset produktif}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{Rumus (15)}$$

Keterangan :

- a. Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga yang disetahunkan.
- b. Rata – rata aset produktif adalah rata – rata aset yang menghasilkan bunga. Aset yang menghasilkan bunga terdiri dari kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Pengukuran tingkat rentabilitas atau profitabilitas pada penelitian ini menggunakan rasio ROA dan NIM sebagai variabel bebas (X) yang mempengaruhi Penyaluran Kredit UMKM sebagai variabel terikat (Y).

2.2.7 Suku Bunga

Pengaturan tingkat suku bunga acuan dapat mendukung terciptanya pasar uang yang liquid dan efisiensi transaksi di pasar uang untuk memperkuat stabilitas moneter serta sistem keuangan di Indonesia. Suku bunga acuan yang dimaksud yaitu suku bunga BI 7-Days (*Reverse*) *Repo Rate*. Penguatan kerangka operasi moneter dilakukan di berbagai bank sentral untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. BI 7-Days (*Reverse*) *Repo Rate* digunakan sebagai suku bunga acuan karena dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil.

BI 7-Days (*Reverse*) Repo Rate memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo. Dampak utama yang diharapkan dengan adanya BI 7-Days (*Reverse*) Repo Rate adalah menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (*Reverse*) Repo Rate 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan, meningkatnya transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan serta terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3-12 bulan.

Pengukuran tingkat suku bunga pada penelitian ini menggunakan Suku Bunga BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate sebagai variabel bebas (X) yang mempengaruhi penyaluran kredit UMKM sebagai variabel terikat (Y).

2.3 Pengaruh Antar Variabel

Pengaruh antar variabel bebas yaitu DPK, NPL, BOPO, ROA, NIM dan Suku bunga BI 7-Day (*Reverse*) Repo rate yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel terikat yaitu Penyaluran Kredit UMKM adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit UMKM

DPK memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran kredit, apabila DPK mengalami peningkatan pada periode saat ini, artinya sumber dana bank juga akan meningkat sehingga bank dapat meningkatkan program penyaluran

dananya dengan memberikan kredit UMKM pada periode selanjutnya. DPK yang meningkat lebih besar berarti bahwa semakin besar juga peningkatan penyaluran kredit UMKM yang artinya DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit UMKM. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Febrianty et al (2018) yang menyatakan bahwa rasio DPK memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap total kredit Bank Umum di Indonesia.

2. Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap Penyaluran Kredit UMKM

NPL memiliki pengaruh negatif terhadap penyaluran kredit apabila rasio NPL meningkat lebih besar dari total kredit yang dapat mengakibatkan peningkatan risiko sehingga dapat berdampak pada premi risiko yang diperhitungkan dalam penentuan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). SBDK yang meningkat mengakibatkan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah juga akan meningkat. Peningkatan suku bunga kredit akan berdampak pada penurunan permintaan kredit UMKM, sehingga penyaluran kredit UMKM akan mengalami kendala. Rasio NPL yang meningkat semakin besar akan berpengaruh pada penurunan penyaluran kredit UMKM pada periode selanjutnya, artinya NPL berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit UMKM. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Istiqomah dan Naning Margasari (2018) yang menyatakan bahwa NPL memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penyaluran kredit investasi oleh Bank Devisa Nasional di Indonesia serta penelitian yang dilakukan oleh Febrianty et al (2018)

yang menyatakan bahwa rasio NPL memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap total kredit bank umum di Indonesia. Pernyataan tersebut tidak didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwitya et al (2018) yang menyatakan bahwa NPL memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bank Umum serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Friskihlah E. Wowiling dan Lisbeth Mananeke (2018) yang menyatakan bahwa rasio NPL memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pemberian kredit pada Bank Pembangunan Daerah.

3. Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap penyaluran kredit apabila Beban Operasional bank meningkat lebih besar daripada pendapatan operasional. Beban yang meningkat lebih besar dibandingkan pendapatan akan berpengaruh pada penurunan laba bank. BOPO yang meningkat lebih besar dapat berdampak pada tingkat penyaluran kredit UMKM pada periode selanjutnya yang semakin menurun, artinya BOPO berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit UMKM. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Friskihlah E. Wowiling dan Lisbeth Mananeke (2018) yang menyatakan bahwa rasio BOPO memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pemberian kredit pada Bank Pembangunan Daerah.

4. Pengaruh *Return On Asset* (ROA)

ROA memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran kredit apabila ROA meningkat lebih besar daripada total aset sehingga pendapatan meningkat lebih besar daripada beban yang menunjukkan bahwa laba akan mengalami

kenaikan. Laba yang meningkat akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat penyaluran kredit UMKM pada periode selanjutnya. ROA yang meningkat semakin besar, maka menunjukkan semakin besar peningkatan penyaluran kredit UMKM pada periode selanjutnya, artinya ROA berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit UMKM. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mutiara Istiqomah dan Naning Margasari (2018) yang menyatakan bahwa rasio ROA memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penyaluran kredit investasi oleh Bank Devisa Nasional di Indonesia, namun pernyataan tersebut tidak didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Friskihlah E. Wowiling dan Lisbeth Mananeke (2018) yang menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pemberian kredit Bank Pembangunan Daerah.

5. Pengaruh *Net Interest Margin* (NIM)

NIM berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Kredit yang disalurkan memiliki kontribusi paling besar dalam memberikan imbal hasil yang berupa bunga, sehingga apabila rasio NIM tinggi menunjukkan bahwa bank semakin efektif dalam menempatkan aset produktifnya dalam bentuk kredit. NIM yang meningkat semakin besar menunjukkan bahwa semakin besar peningkatan penyaluran kredit UMKM pada periode selanjutnya, artinya NIM berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit UMKM. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Febrianty et al (2018) yang menyatakan bahwa rasio NIM memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap total kredit Bank Umum di Indonesia.

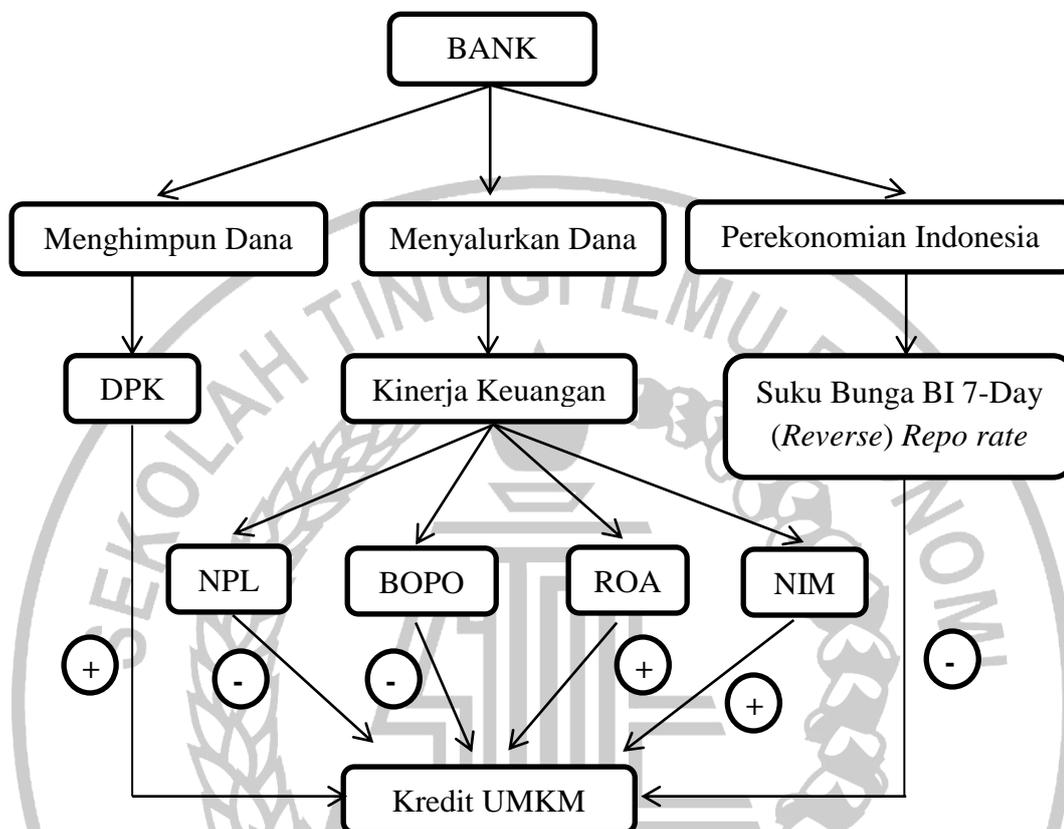
6. Pengaruh Suku Bunga BI 7-Days (Reverse) Repo Rate

Suku Bunga BI 7-Days (Reverse) Repo Rate berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit. Suku Bunga BI 7-Days (Reverse) Repo Rate yang meningkat dapat berpengaruh pada meningkatnya komponen Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), sehingga suku bunga kredit yang ditawarkan kepada nasabah juga akan meningkat serta dapat berdampak pada penurunan permintaan terhadap kredit. Suku Bunga BI 7-Days (Reverse) Repo Rate yang meningkat dapat menunjukkan menurunnya permintaan terhadap kredit UMKM, artinya Suku Bunga BI 7-Days (Reverse) Repo Rate berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit UMKM. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Andyta Diar Pratiwi (2019) yang menyatakan bahwa rasio Suku Bunga BI 7-Day (Reverse) Repo Rate memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM Bank Umum Syariah, namun tidak didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Istiqomah dan Naning Margasari (2018) yang menyatakan bahwa rasio Suku Bunga BI 7-Day (Reverse) Repo Rate tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit investasi Bank Devisa Nasional di Indonesia.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diperoleh dari landasan teori yang menunjukkan bahwa variabel – variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Kerangka ini disajikan mulai dari fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada nasabah serta faktor eksternal yang yaitu

kondisi perekonomian Indonesia yang memiliki pengaruh terhadap kondisi perbankan.



Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari Penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran diatas adalah sebagai berikut :

1. DPK, NPL, BOPO, ROA, NIM dan Suku Bunga BI 7-Days (Reverse) Repo Rate secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran Kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah Konvensional.
2. DPK secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap penyaluran Kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah Konvensional.

3. NPL secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap penyaluran Kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah Konvensional.
4. BOPO secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap penyaluran Kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah Konvensional.
5. ROA secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap penyaluran Kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah Konvensional.
6. NIM secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap penyaluran Kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah Konvensional.
7. Suku Bunga BI *7-Days (Reverse) Repo Rate* secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap penyaluran Kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah Konvensional.

